BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Posisi desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah.Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan penegasan, yakni Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Maka pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Namun pada kenyataannya masih banyak pemerintah desa yang kurang berjalan secara efektif dan efisien dalam menyelengarakan pemerintahan karena permasalahan komunikasi.

Menurut Tierney dan James T. Minor (2004:93) dalam *jurnal A Cultural Perpective on Communication and Governnace* menyatakan *"Communication is not a cure-all for thr current woes that confront those involved in shared governance, but a concern for organizational reform must be balanced with an awareness of the communicative codes within the workplace." (* Komunikasi adalah tidak obat-semua untuk saat ini thr kesengsaraan yang menghadapi mereka yang terlibat dalam

pemerintahan bersama, tetapi kekhawatiran untuk reformasi organisasi harus diseimbangkan dengan kesadaran kode komunikatif dalam tempat kerja).

> Hampir semua aparat pemerintahan paham tentang komunikasi namun tidak semuanya memahami bagaimana berkomunikasi secara efektif, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan melakukan fungsi-fungsi utama pemerintahan yang mencakup pelayanan, pemberdayaan, dan bersama-sama masyarakat mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan pihak lain secara ilegal(Hasan, 2005:114).

Pemerintahan berlangsung dari tataran tinggi sampai pada tataran rendah, salah satu tujuan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam tataran rendah bisa dilihat pada sistem pemerintahan desa.Penyelengaraan pemerintahan di desa mendasari bahwa desa memiliki peran penting untuk mensejahterakan masyarakat, terutama melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat. Menurut Komalasari dkk (2009:128) dalam jurnal *Public Service Motivation dan Organizational Citizenship Behavior* terhadap Kinerja Pemerintahan menyatakan bahwa :

> Upaya untuk meningkatan kinerja organisasional bisa diawali dengan meningkatkan kinerja individual, kinerja individual dipengaruhi oleh banyak aspek termasuk didalamnya aspek motivasional secara personal, aspek motivasional adalah public service motivation, organizational citizenship behavior, kepuasan kerja dan komitmen organisasional.

Perkembangan pemerintahan saat ini telah mengalami banyak perubahan. Antara lain : mengenai tugas serta fungsi pemerintah dalam memberdayakan segala sumber daya yang dimiliki untuk dapat unggul dalam bersaing dan tetap bertahan, maka pemerintahan desa harus adaptif dan lebih fleksibel, sedangkan untuk mencapai tujuan pemerintahan tersebut diperlukan komunikasi sebagai sarana penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa sebagai wujud demokrasi.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kalisari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan dijumpai penulis dalam pengamatan awal di lokasi penelitian menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi secara *horisontal* antar perangkat

desadan komunikasi *vertikal* sosialisasi kepada masyarakat sehingga menimbulkan pebedaan sikap dalam menjalankan pemerintahan.

Perbedaan persepsi antar perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan selayaknya dijembatani secara proporsional dan bertanggung jawab oleh kepala desa. Sesuai masalah yang dijumpai penulis yaitu dalam lingkup pembangunan,sosialisasi maupun transparansi di Desa Kalisari,mengutip dari beberapa pendapat masyarakat desa Kalisari bahwa ada proyek pembangunan desa mengalami hambatan dalam pelaksanaan di lapangan yaitu dana desa yang dialokasikan,belum di informasikan secara transparan dan juga sikap pro-aktif dari masyarakat tidak didukung oleh kebijakan yang berkesinambungan sehingga pemanfaatan efektivitas dana dan waktu dalam menjalankan program pembangunan kurang berjalan dengan baik. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan sikap *apatisme* masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Kalisari.

Kasus di atas menunjukan bahwa kurangnya komunikasi pemerintah desa dan masyarakat Desa Kalisari, maka sangat perlu adanya *human relations* dalam sistem manajemen disuatu lembaga sudah layaknya dilakukan secara optimal oleh pemerintahan. Tujuan *human relations* adalah untuk mensinergikan segala sumber daya yang dimiliki agar pemerintahan mampu menghasilkan timbal balik yang positif dalam menyelengarakan pemerintahan desa yang efektif dan efisien sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Human relations* sebagai langkah utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang mampu berkomunikasi dan berkoordinasi secara manusiawi, dalam penyelengaraan pemerintahan terdapat pegawai sebagai pelayan masyarakat sehingga pegawai pemerintahan desa terutama mampu menggunakan komunikasi yang efektif kepada masyarakat umum atau *public relations.* Sedangkan Fungsi *public relations* menurut Bertrand R. Canfield dalam bukunya *Public Relations, Principles and Problems* mengemukakan tiga fungsi public relations yakni: mengabdi kepada kepentingan umum, memelihara komunikasi yang baik dan menitik-beratkan moral dan tingkah laku yang baik

Human Relations merupakan hal yang penting dalam kesuksesan suatu kegiatan apapun, Terutama dalam suatu organisasi pemerintahan ataupun pekerjaan.Hubungan antara manusia yang baik akan menciptakan suatu keharmonisan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ditinjau dari ilmu

komunikasi, “hubungan manusiawi itu termasuk kedalam komunikasi antarpersona (interpersonal communication) sebab berlangsung pada umumnya antara dua orang secara dialogis” (Effendy, 2015: 138). Manusia merupakan individu yang berbeda-beda maka secara langsung atau tidak langsung akan menciptakan permasalahan besar maupun kecil. Penguasaan *human relations* yang baik untuk memecahkan masalah komunikasi ataupun koordinasi,Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin melakukan kajian tentang “Pelaksanaan *Human Relations* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kalisari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Tahun 2016”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *human relations* Pemerintahan Desa Kalisari ?
2. Bagaimana hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan *human relations* pemerintah Desa Kalisari ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Desa Kalisari dalam mengatasi hambatan pelaksanaan *human relations?*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan:

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan *human relations* yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kalisari.
2. Untuk mendiskripsikan hambatan yang dihadapi dalam pelaksananaan *human relations* di Desa Kalisari.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Desa Kalisari dalam mengatasi hambatan pelaksanaan *human relations.*

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan:

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis
   a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan dan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan *Human Relations* dalam penyelengaraan pemerintahan desa.
   b. Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.
2. Manfaat atau Kegunaan Praktis
   a. Manfaat bagi Pemerintah Desa
      1) Meningkatkan koordinasi antar perangkat desa.
      2) Meningkatkan motivasi kerja pegawai perangkat desa.
      3) Meningkatkan komunikasi antar perangkat desa.
      4) Meningkatkan kinerja pemerintahan desa.
   b. Manfaat bagi Masyarakat Desa
      1) Meningkatkan kerja sama antara masyarakat dan perangkat desa.
      2) Memberi kepercayaan terhadap kinerja pemerintah desa.
      3) Untuk meningkatkan transparansi pemerintah desa.
   c. Manfaat bagi Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
      1) Mendapatkan pengetahuan baru tentang tugas dan fungsi pemerintahan desa.
      2) Memberi wawasan tentang pentingya komunkasi dalam lembaga pemerintahan.
      3) Sebagai calon pendidik, pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh mampu di transformasikan khususnya bagi siswa.
   d. Manfaat bagi Peneliti
      1) Sebagai bahan acuan serta pertimbangan penelitian terutama di bidang ilmu pemerintahan.
      2) Sebagai pengetahuan baru tentang pentinya *human relations* untuk meningkatkan kinerja lembaga pemerintahan.
      3) Sebagai masukan untuk menambah wawasan.